

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Temuan atau penelitian terdahulu mengidentifikasi dan menjelaskan beberapa hasil penelitian yang pernah/sudah dilakukan oleh peneliti sebelum – sebelumnya. Akan tetapi didalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan fokus pembahasan. penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat mengembangkan penelitiannya. Penelitian – penelitian terdahulu dengan permasalahan yang akan dikaji tentang kekerasan seksual pada perempuan adalah sebagai berikut, diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kurnianingsih Sri (2003), yang berjudul Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja. Menjelaskan bahwa sebagian besar dari fenomena kekerasan/pelecehan seksual perempuanlah yang menjadi korban dan pelakunya sebagian besarnya laki – laki. namun itu bukan berarti laki – laki aman dari kekerasan/pelecehan seksual, ada juga sedikit kasus yang menjadi korbannya adalah kaum laki-laki. Pola peran jenis laki – laki agresif dan aktif (maskulin) dan pola perempuan yang pasif (feminim) diubah dengan harapan dan peran dalam tempat bekerja dan menyebabkan permasalahan yang kompleks. Korban kekerasan/pelecehan seksual dihadapkan dengan pilihan yang pilu dan menyakitkan yakni korban harus menanggung kerugian akibat

kekerasa/pelecehan seksual, dan juga rasa malu apabila kasusnya tersebut menjadi dikenal masyarakat atau dipublikasikan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Harnoko Rudi. B (2010), yang berjudul Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. Menjelaskan bahwa didalam kekerasan dalam bentuk apapun itu dapat menimbulkan dua relasi yang tidak seimbang, diantaranya pelaku adalah pihak – pihak yang kuat sedangkan korban merupakan pihak yang lemah. Maka dari itu para feminis menyebutkan tindak kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender merupakan suatu tingkah laku atau suatu tindakan menurut perbedaan jenis kelamin yang menimbulkan kesengsaraan atau derita berupa secara fisik, seksual dan juga psikologis serta mendapat ancaman indakan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan menegenai perempuan itu sendiri (perilaku yang menyimpang).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Meilia Ika. D. P (2012), yang berjudul Prinsip Pemeriksaan dan Penatalaksanaan Korban (P3K) Kekerasan Seksual. Menjelaskan bahwa seorang dokter atau petugas medis yang memegang suatu kasus kekerasan seksual harus mempunyai sikap objektif-imparsial (seorang dokter tidak dianjurkan untuk memihak terlebih dalam kepada korban sehingga sangat mempercayai semua yang korban katakan), konfidensial, dan juga profesional. Tunjukan hasil dari pemeriksaan dalam visum er repertum dengan ketentuan dan keperluannya saja, serta harus menjaga kerahasiaan data medis yang tidak terkait dengan kasus – kasus yang ada. Profesionalitas juga ditunjukkan melalui pemeriksaan yang pas dengan

kaidah – kaidah kedokteran yang umum dan mutakhir dengan memperhatikan hak dan kewajiban para korban sekaligus pasien juga dokter. Tindak lanjut dari team medis juga dapat mencakup penatalaksanaan psikiatrik dan penatalaksanaan bidang obstetri-ginekologi.

Keempat, penelitian Sumera Marchelya (2013), yang berjudul Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. Menjelaskan bahwa ancaman kekerasan/pelecehan seksual masih tidak bisa dibentung, terus menerus ancaman yang mengerikan itu masih terjadi di belahan dunia manapun, dan korbannya adalah perempuan (kekerasan/pelecehan seksual sudah merupakan isu global). Kasus pemerkosaan seperti contohnya, dimana korbannya selalu mendapatkan pemaksaan bahkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pelaku yang tidak memandang hulu. Hanya merasakan puas dan tidak bisa menahan nafsu. Tidak boleh suatu negara menunda akan kebijakan guna menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan perempuan merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi, padahal dibenak perempuan harus dan berhak mendapatkan dan juga menikmati perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi disegala bidang dan semuanaya yang menyangkut perempuan. Mengutuk tindak kekerasan harus dilakukan oleh negara ini, karena sudah banyak dari perempuan dinegara ini mengalami kekerasan/pelecehan seksual. Para pelaku harus mendapatkan hukuman yang berat, karena aib yang diderita oleh seorang perempuan tidak dapat dihapuskan disepanjang hidupnya. Pelanggaran hak perempuan seperti tindak

kekerasan seksual mudah diinterpretasikan sebagai tindakan yang betul – betul dilarang.

Kelima, penelitian Hidayat Tufiq. M.dkk (2017) yang berjudul Citra Perempuan Dalam Berita Kekerasan Seksual. Menjelaskan bahwa citra disini memuat dengan adanya citra peraduan dan terlihat memiliki kesamaan makna yaitu pertanda. Pertanda disini dapat dilihat semisal tanda – tanda akan adanya kekerasan /pelecehan seksual itu sendiri sudah amat dikenali. Ada juga yang melihatkan tanda – tanda seperti tanda yang tergolong bentuk pemerkosaan, tanda yang termasuk dalam kategori tindakan pemukulan dan serangan fisik, tanda yang termasuk dalam kategori kekerasan terselubung. Mengenai pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik yang sangat erat kaitannya dengan jurnalisme sensitif gender.

2.2 Konsep Advokasi

2.2.1 Pengertian Advokasi

Advokasi adalah suatu tindakan yang ditunjukkan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atau program dari segala tipe institusi. Advokasi mengajukan, mempertahankan atau merekomendasikan suatu gagasan dihadapan orang lain. Advokasi berbicara, menarik perhatian masyarakat tentang suatu masalah, dan mengarahkan pengambilan keputusan mencari solusi. Advokasi dapat melibatkan berbagai aktivitas jangka pendek yang spesifik untuk mencapai pandangan tentang perubahan jangka panjang dan juga terdiri atas berbagai macam strategi yang diarahkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada

tingkat organisasi, lokal, provinsi, nasional dan internasional (Sharma.R.Ritu,2004:7-8). Dalam advokasi juga berbicara, menarik perhatian masyarakat tentang suatu masalah dan mengarahkan pengambil keputusan mencari solusi. Menurut Notoadmodjo (Zulyadi Teuku ,2004:hal 64) advokasi juga diartikan sebagai upaya pendekatan (approaches) terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.

Didalam aktifitas - aktifitas advokasi tidak memperbolehkan suatu organisasi atau lembaga pendamping untuk menjadi dewa penolong atau pahlawan, dikarenakan dapat menjadikan organisasi atau lembaga sebagai charity/amal.Memasukkan suatu problem kedalam agenda, mencari solusi mengenai problem tersebut dan membangun dukungan untuk bertindak menangani problem maupun solusinya.

Tabel 2.1 Definisi advokasi menurut para pakar

Nama	Definisi/penjelasan advokasi
Notoadmodjo	Advokasi juga diartikan sebagai upaya pendekatan (approaches)terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.
Mansour Faqih, dkk	Advokasi adalah usaha sistem dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara tertahap-maju (incremental).
Julie Strirling	Advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik.

(Zulyadi,Teuku .2004:hal 66)

Kerja – kerja advokasi adalah serangkaian kegiatan yang sangat kompleks sehingga tidak akan pernah ada suatu organisasi yang akan mampu sendirian melaksanakan semua kegiatan advokasi tersebut,

dalam hal inilah, penggalangan sekutu dan sistem pendukung menjadi sangat vital dalam kegiatan advokasi. Sekutu dalam kegiatan advokasi adalah perseorangan, kelompok, atau organisasi yang memiliki sumber daya yang bersedia, dan kemudian terlibat aktif langsung, mendukung dengan mengambil peran, fungsi, atau tugas tertentu dalam rangkaian kegiatan advokasi. Sebagian besar advokasi yang efektif tergantung pada hubungan yang dikembangkan oleh para pelaksana advokasi dengan para pembuat keputusan, tokoh – tokoh berpengaruh dan sasaran advokasi kunci lainnya. Makin kuat ikatan kepercayaan, saling mendukung, dan kredibilitas antara petugas advokasi dengan sasaran advokasi, akan makin efektiflah pelaksana advokasi tersebut.

A. Unsur – unsur Pokok Kegiatan Advokasi

Teknik dan strategi advokasi yang spesifik memang beragam, tetapi unsur – unsur berikut ini merupakan bagian dari advokasi yang efektif. Karena hanya merupakan bagian maka tidak perlu menggunakan setiap bagian tersebut untuk menciptakan strategi advokasi. Kecuali itu, unsur – unsur ini tidak perlu digunakan didalam urutan seperti yang disajikan dibawah ini. (Sharma.R.Ritu,2004:10-13)

1. Memilih tujuan advokasi

Masalahnya mungkin sangat kompleks. Agar usaha advokasi itu berhasil, tujuan umumnya harus dipersempit sampai pada tujuan advokasi.

2. Menggunakan data dan penelitian untuk advokasi

Data dan penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat ketika memilih masalah yang akan ditangani, mengidentifikasi solusi bagi masalah tersebut, dan menentukan tujuan yang realistis. Kecuali itu, data yang baik itu sendiri dapat menjadi argumentasi yang menarik.

3. Mengidentifikasi sasaran advokasi

Jika masalah dan tujuannya telah dipilih, usaha advokasi itu harus diarahkan kepada orang – orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan idealnya, kepada orang – orang yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu, seperti staf, penasihat, orang tua – tua yang berpengaruh, media, dan masyarakat.

4. Mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi

Berbagai macam sasaran advokasi memberikan tanggapan terhadap pesan yang berbeda – beda pula.

5. Membentuk koalisi

Seringkali kekuatan advokasi terdapat pada beberapa orang yang mendukung tujuan umum. Khususnya dimana demokrasi dan advokasi merupakan fenomena yang baru, yang melibatkan sejumlah besar orang yang mewakili kepentingan yang berbeda – beda itu dapat memberikan jaminan keamanan bagi advokasi maupun untuk membentuk dukungan politik.

6. Membuat presentasi yang persuasif

Kesempatan untuk mempengaruhi sasaran advokasi yang merupakan tokoh kunci seringkali terbatas. Persiapan yang cermat dan mendalam untuk membuat argumentasi yang meyakinkan dan gaya penyajian mungkin dapat mengubah kesempatan yang sempit itu menjadi advokasi yang berhasil.

7. Mengumpulkan dana untuk kegiatan advokasi

Sebagian besar kegiatan, termasuk advokasi, memerlukan sumber dana. Usaha untuk melakukan advokasi secara keberlanjutan dalam waktu yang panjang berarti menyediakan waktu dan energi dalam mengumpulkan dana atau sumber daya yang lain sebagai dukungan.

8. Mengevaluasi usaha advokasi

Evaluasi ini sangat penting sekali, karena semua kegiatan tentunya ada beberapa kendala ataupun kurang tepat yang tak terduga di sebelumnya. Maka dari itu mengevaluasi juga harus benar sesuai dan sangat rinci.

B. Kerangka Konseptual untuk Advokasi

Advokasi merupakan proses dinamis yang menyangkut seperangkat pelaku, gagasan, agenda dan politik yang selalu berubah. Walaupun demikian proses yang bersifat multi faset ini dapat dibagi menjadi lima tahap. (Sharma.R.Ritu,2004:14-16).

Tahap pertama, adalah mengidentifikasi masalah untuk mengambil tindakan kebijakan. Tahap ini juga mengacu pada

penetapan agenda. Terdapat problem tidak terbatas jumlahnya yang perlu diperhatikan, tetapi tidak semuanya harus mendapat tempat didalam agenda tindakan.

Tahap kedua, merumuskan solusi, segera menyusul. Petugas advokasi dan pelaku kunci yang lain mengusulkan solusi mengenai problem tersebut dan memilih salah satu yang layak ditangani secara politis, ekonomi, dan sosial.

Tahap ketiga, membangun kemauan politik untuk bertindak mengenai problem itu dan mendapatkan solusinya merupakan bagian terpenting dari advokasi. Tindakan dalam tahap ini meliputi, membentuk koalisi, menemui para pengambil keputusan, membangun kesadaran dan menyampaikan pesan yang efektif.

Tahap keempat, melaksanakan kebijakan, terjadi jika problemnya telah diketahui, solusinya diterima dan ada kemauan politik untuk bertindak, semuanya secara serentak. Keadaan tumpang tindih ini biasanya merupakan suatu “celah peluang” yang dapat lenyap dengan cepat yang harus ditangkap oleh petugas advokasi.

Tahap kelima, evaluasi, seringkali tidak tercapai, meskipun hal itu penting. Kegiatan advokasi yang baik harus menilai efektivitas dari usahanya yang telah berjalan dan menentukan sasaran baru yang berdasarkan pengalaman. Para penyumbang pikiran dan institusi yang menerima perubahan kebijakan secara periodik perlu mengevaluasi efektifitas perubahan tersebut.

2.3 Konsep Advokasi Sosial

2.3.1 Pengertian Advokasi Sosial

Advokasi sosial merupakan suatu upaya yang memberikan perlindungan, pendampingan, serta pembelaan kepada seseorang/individu, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat luas yang sudah dilanggar haknya. Terdapat UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpengaruhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Menurut Absor (2012:257) Advokasi sosial sering dianggap sebagai salah satu strategi yang ampuh untuk menyelesaikan permasalahan sosial. *“Purposeful activities social workers undertake to change policies, practices, and condition on behalf of individuals or groups”* (serangkaian kegiatan yang terencana untuk mengubah

kebijakan, praktek dan kondisi yang menindas yang dilakukan oleh pekerja sosial). tujuan advokasi adalah memperjuangkan hak individu, kelompok atau masyarakat, melindungi dari segala macam bentuk penindasan (eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, dan marginalisasi), menyelesaikan hambatan birokratis dalam pemberian layanan social, dan memfasilitasi tersedianya akses terhadap sumberdaya, layanan dan peluang-peluang lain yang ada.

Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan yang terorganisir dan terencana melalui serangkaian kegiatan adalah sebuah keniscayaan. Menurut Absor, M. U. (2012:258) di dalam buku Mansur Fakhri (2007) menjelaskan strategi advokasi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan diatas adalah:

1. Melancarkan tekanan seperti unjuk rasa,boikot,mogok, aksi massa, dan juga demonstrasi dll.
2. Mempengaruhi pendapat umum seperti kampanye, jajak pendapat, siaran/pernyataan.
3. Mempengaruhi pembuan dan pelaksana kebijakan seperti lobbi, ada negosiasi, mediasi dan kolaborasi.
4. Melakukan pembelaan seperti class action dan legal standing.
5. Mengajukan konsep tanding seperti seminar, legal drafting, counter draf dan judicial review.

Salah satu hasil dari advokasi adalah kebijakan sosial.Menurut Suharto (dalam jurnal Absor,2012), kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah

terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan juga untuk mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya. Secara garis besar, Midgley mengklasifikasi kebijakan sosial dalam tiga kategori, yakni 1) perundang-undangan, 2) program pelayanan sosial dan 3) sistem perpajakan.

2.3.2 Advokasi Pekerjaan Sosial

Dalam pekerjaan sosial advokasi dapat dilihat dari sejarah pekerjaan sosial itu sendiri. Pekerjaan sosial merupakan perwujudan untuk membantu individu, kelompok, dan orang yang tidak mampu agar dapat membantu diri mereka sendiri. Dan advokasi sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pekerjaan sosial. Berpijak pada literatur pekerjaan sosial, (menurut Zulyadi Teuku, 2004:hal 66-67) advokasi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu ‘advokasi kasus’ (case advocacy) dan ‘advokasi kelas’ (class advocacy); Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya, terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien individual. Karenanya,

advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (*client advocacy*).

Menurut Zulyadi Teuku,(2014:66-67) literatur pekerjaan sosial terbagi atas dua jenisnya, antara lain advokasi kasus dan advokasi kelas:

1. Advokasi kasus merupakan kegiatan atau suatu kerjaan yang dilakukan oleh pekerja sosial gunanya membantu klien supaya mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Pekerja sosial berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien individual. Karenanya, advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (*client advocacy*).
2. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan.

Advokasi yang dilakukan pekerja sosial dalam hal membantu sesamanya seringkali sangat berkaitan dengan konsep manajemen sumber (*resource management*). Melakukan advokasi berarti bertindak sebagai seorang perantara, penengah, atau pembela yang akan bertindak seperti penghubung antara masyarakat dengan berbagai lembaga atau pihak – pihak yang terkait. Hal ini dilakukan untuk membantu pemecahan masalah ataupun pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat, dengan melakukan kontak dan berbagai pendekatan dengan

berbagai instansi pemerintah disemua tindakan. Advokasi juga indentik dengan kerja keras, sebagai penyemangat di dalam membela kebenaran dan juga melawan akan hal – hal ketidakadilan.advokasi ini sudut pandang keilmuannya bukan mengenai formula yang baku. Beradvokasi keberhasilannya bisa didapat jika direncanakan secara sistematis. Demi mempermudah pemahaman, maka dapat membagi strategi advokasi ke dalam tiga setting atau aras (mikro, mezzo dan makro) dan mengkajinya dari empat aspek (tipe advokasi, sasaran/klien, peran pekerja sosial, dan teknik utama).

Tabel 2.2 Setting dan Tipe advokasi sosial

Aspek	Setting			
	Mikro	Mezzo	Makro	
Tipe Advokasi	Advokasi Kasus	Advokasi Kelas	Advokasi Kelas	Legislatif advokasi
Sasaran/klien	Individu dan keluarga	Advokasi kelas kelompok formal dan organisasi	Advokasi kelas masyarakat lokal dan nasional	Anggota legislatif
Peran pekerja sosial	Broker	Mediator	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivis • Analisis kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivis • Analisis kebijakan
Teknik utama	Manajemen kasus (case management)	Jejaring (networking)	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi sosial • Analisis kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivis • Analisis kebijakan

(Zulyadi,Teuku .2004:hal 67)

2.4Konsep Kekerasan Seksual

2.4.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut Wahid Abdul dan Irfan Muhammad (2001:31-32),berdasarkan kamus hukum, “sex dalam bahasa Inggris diartikan

dengan jenis kelamin” (Yan Pramadya Puspa, 1989; 770). Jenis kelamin inilah dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki – laki dengan perempuan. Marzuki Umar Sa’bah mengingatkan, “membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Ada dua kategori dari seksualitas manusia yaitu (a) seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik, (b) seksualitas imoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat”. Meskipun pendapat tersebut mengingatkan agar tidak menyempitkan pembahasan mengenai seks, yaitu mengenai salah satu bentuk seksualitas yang imoral dan jahat. Artinya ada praktik seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma – norma keagamaan. Oleh karena itu seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) biologis, kenikmatan fisik dan keturunan. (2) sosial, hubungan – hubungan seksual, berbagai aturan sosial serta sebagai bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan. (3) subjektif, kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual.

Menurut Purwanti dan Zaliani (2018), salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara – cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran agama Islam khususnya. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik

yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha – usaha jahatnya. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang.

Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan pada korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Kekerasan/pelecehan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan/pelecehan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas – aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti, atau melukai korban.

Secara teoritis, dapat dikatakan bahwa pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan oleh laki – laki pada hakekatnya adalah gejala yang sangat kompleks, mengakar dalam hubungan kekuasaan yang berbasis gender, seksualitas, identitas diri, serta dipengaruhi oleh pranata sosial yang berkembang di komunitas itu. Kekerasan seksual banyak dipahami dan dianggap sebagai suatu perpanjangan kontinum keyakinan yang memberi hak kepada laki – laki untuk mengendalikan perilaku perempuan, membuat perempuan tidak memiliki kebebasan terhadap kehidupan seksual dan peran reproduksinya sendiri, misalnya dalam representasi simbolik dan ritual hubungan seksual.

Hal seperti ini menjadi tanggung jawab dari pihak – pihak terkait untuk memperkecil atau mengurangi maraknya kekerasan seksual karena dampak yang didapat dan dirasakan amat besar bagi korban. Berdampak pada psikologis korban kekerasan seksual yang mendalam. Mereka harus menghadapi beberapa tekanan dari lingkungan disekitarnya yang terkadang banyak menyalahkan, rasa malu korban, gangguan stres pasca trauma, mempunyai masalah gangguan tidur, depresi tinggi, perasaan yang kesepian, korban pindah dilingkungan baru, cemas, dan keinginan untuk bunuh diri. Dari dampak atau efek yang ditimbulkan para pelaku kejahatan kemanusiaan (kekerasan seksual) terhadap korban, betapa seriusnya perilaku tersebut, suatu hal yang menjadi menarik karena kasus kejahatan seksual tidak akan terjadi apabila tidak ada pelaku. Secara umum para pelaku yang melakukannya adalah orang dewasa, penyebab umum bisa diakibatkan oleh kondisi - kondisi yang menekan, seperti kondisi sosial - ekonomi lemah, individu yang memiliki kepribadian patologis atau abnormal dan adapun yang sedang mempengaruhi pelaku.

2.4.2 Bentuk – bentuk Kekerasan

1. Kekerasan Perempuan

Menurut pernyataan Komnas Perempuan (didalam penelitian Perempuan,K,2002), menyatakan bahwa kekerasan yang dialami perempuan sangat banyak bentuknya, baik yang bersifat psikologis, fisik, seksual maupun yang bersifat ekonomis, budaya dan keagamaan,hingga yang merupakan bagian dari sebuah sistem

pengorganisasian lintas negara yang sangat besar dan kuat. Bentuk-bentuk kekerasan ini hadir dalam seluruh jenis hubungan sosial yang dijalani seorang perempuan, termasuk dalam hubungan keluarga dan perkawinan dekat, dalam hubungan kerjanya maupun dalam hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan secara umum. Semua jenis kekerasan ini berlangsung baik di komunitas yang hidup dalam keadaan damai, dan dalam masyarakat yang berada di tengah kemelut peperangan atau konflik bersenjata.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang selama ini teridentifikasi oleh para pendamping korban kekerasan di berbagai pelosok Indonesia mencakup:

a. Kekerasan Fisik

Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup, antara lain, tamparan, pemukulan, penjambakan, pendorong-dorongan secara kasar (melukai), menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, setrikaan, serta pembakaran.

b. Penyiksaan Mental

Bentuk-bentuk penyiksaan psikologis yang dialami perempuan mencakup makian dan penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang diberi untuk memunculkan rasa takut, larangan ke

luar rumah atau bentuk-bentuk pembatasan kebebasan bergeraklainnya.

c. Deprivasi Ekonomi

Salah satu bentuk kekerasan yang dialami perempuan, khususnya yang berstatus sebagai istri atau ibu rumah tangga, adalah tak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan wajar sehari-hari. Selain itu, ada pula perempuan yang dipaksa atau dilarang untuk tidak bekerja dalam situasi yang bertentangan dengan keinginan perempuan korban.

d. Diskriminasi

Kaum perempuan mengalami berbagai bentuk diskriminasi, baik di dalam lingkungan keluarganya maupun di tempat kerjanya.

e. Serangan Seksual

Kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut 'pelecehan seksual', maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang sering disebut sebagai perkosaan. Tindak perkosaan tidak hanya terbatas pada pemaksaan masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, tetapi juga termasuk penggunaan benda-benda asing lain untuk menimbulkan kesakitan pada alat kelamin, dan bagian-bagian lain dari tubuh korban.

f. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual adalah salah satu bentuk serangan seksual yang bersifat sistematis dan muncul dalam situasi perang atau konflik bersenjata.

g. Intimidasi Berbasis Gender

Perempuan menjadi sasaran khusus dari berbagai tindakan ancaman, intimidasi bahkan serangan fisik karena korban dianggap melanggar ketentuan sosial tertentu, seperti cara berpakaian atau perilaku seksual yang tidak mau diterima oleh pihak-pihak tertentu dalam masyarakat.

h. Perdagangan Perempuan

Perempuan Indonesia, baik yang dewasa maupun anak-anak di bawah umur, banyak yang menjadi korban praktik-praktik perdagangan manusia, apalagi dalam situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan.

2. Kekerasan Seksual Perempuan

Menurut Ricardo, A. (2017:23). bentuk – bentuk kekerasan seksual:

a. Perkosaan

Perkosaan (Wahid Abdul & Irfan. M, 2001:40) menurut kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan 1) paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki – laki terhadap terhadap seorang

perempuan dengan cara yang menurut moral dan hukum yang berlaku melanggar.

b. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan

Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

c. Pelecehan Seksual

Menggunakan siulan, bermain mata, ucapan – ucapan yang bernuansa seksual, serta mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual dan sebagainya.

d. Eksploitasi Seksual

Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

e. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran.

f. Prostitusi Paksa

Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan.

g. Perbudakan Seksual

Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengekapnya.

h. Pemaksaan perkawinan, termasukcerai gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.

i. Pemaksaan Kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya.

j. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.

k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.

l. Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memperlakukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Kebiasaan masyarakat , kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan.

- o. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik.

2.4.3 Tempat Terjadinya Kekerasan Seksual

Waktu dan lokasi kejadian kekerasan seksual (menurut Ricardo, A. 2017:24), juga bervariasi antar-negara dan antar-kota. Lokasi kejadian pelanggaran/kekerasan seksual dapat terjadi di rumah pelaku, tempat kerja pelaku, rumah korban, rumah anggota keluarga, penginapan/hotel, mobil dan lain – lain. kekerasan seksual juga dapat terjadi di dalam keluarga, ditempat kerja, ditengah – tengah masyarakat, dan diranah negara. Dari data *Bureau of Justice Statistics*, sekitar 33% kasus pelanggaran. kekerasan seksual dilakukan antara pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore, sekitar 43% antara pukul 6 sore hingga tengah malam, dan sekitar 23,6% terjadi antara tengah malam hingga pukul pagi.

Dari data *Bureau of Justice Statistyc*, sekitar 37% pelanggaran seksual terjadi dirumah korban, sekitar 19% terjadi dirumah teman,tetangga atau kerabat, sekitar 10% terjadi dijalanan yang jauh dari rumah, sekitar 7% terjadi ditempat parkir/garasi, dan sekitar 26% terjadi dilokasi yang lain. data ini bisa saja berbeda pada tiap kota, di Indonesia sendiri belum ada gambaran yang menunjukkan persentase waktu dan lokasi kejadian terjadinya pelanggaran seksual ditiap – tiap kota.

2.4.4 Pelaku Dari Kekerasan Seksual

Menurut Ricardo,A.(2017:22-23), pelanggaran seksual dapat dilakukan oleh satu atau lebih pelaku. Bisa dilakukan oleh orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal. Dari laporan beberapa organisasi pendamping perempuan, seringkali korban mengaku atau menyampaikan bahwa pelaku kekerasan seksual bisa saja dari orang – orang terdekat misalnya ayah, paman, saudara laki – laki, pacar, tetangga, majikan, dan guru. Ada pula kasus – kasus dimana pelaku kekerasan seksual adalah aparat negara, tokoh masyarakat, dan pejabat buplik yang tidak memiliki relasi personal dengan korban.

Dimasyarakat umum mungkin ada beberapa mitos yang beredar tentang ciri – ciri dari pelaku pelanggaran seksual, seperti pelaku melakukan paksaan untuk melakukan hubungan seksual, kebanyakan pelaku adalah orang asing atau yang tidak dikenal, semua pelaku pasti melakukan pemerkosaan, semua pelaku tampak menyeramkan, dan bertingkah aneh, kebanyakan pelaku merupakan mantan kriminal atau

pernah dipenjara sebelumnya, orang – orang yang tampak baik dan suka menolong tidak akan pernah melakukan pelanggaran/kekerasan seksual, semua pelaku pelanggaran seksual adalah laki – laki, biasanya pelaku melakukan pelanggaran/kekerasan seksual dalam pengaruh minuman keras.

Faktanya pelanggaran seksual tidak hanya sampai tahap penetrasi penis ke vagina, tetapi beberapa pelaku juga hanya melakukan perabaan atau menyentuh bagian tertentu dari korbannya. Selain itu beberapa pelaku bisa saja menyentuh bagian – bagian tersebut dengan terkesan tidak sengaja. Sebagian besar pelaku pelanggaran seksual adalah laki – laki, namun ada juga sebagian kecil wanita yang melakukan kejahatan seksual. Wanita biasanya melakukan kejahatan seksualnya kepada anak – anak.

2.4.5 Korban Kekerasan Seksual

Korban kekerasan seksual adalah mereka yang menderita jasmaniah dan juga rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari kepuasan untuk sendiri tanpa memikirkan orang lain padahal itu sudah bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Korban kekerasan seksual disini khususnya kaum perempuan. Karena perempuan adalah merupakan sosok istimewa yang memang terlahir dengan perasaan yang kuat sekaligus sangat rapuh. Maka dari itu dapat disebut juga perempuan adalah makhluk yang lemah sehingga bagi lawan jenisnya mudah untuk merayu, mudah untuk memanfaatkan dan lain sebagainya.

Sering kali di kabarkan bahwa wanita lebih sering menjadi korban kekerasan/pelecehan seksual dibandingkan laki – laki. Perempuan selalu dianggap sebagai pihak yang mengundang nafsu laki – laki. Laki – laki mudah sekali terangsang apabila melihat perempuan yang sekiranya cantik atau seksi. Maka dari itu orang tua selalu mewanti wanti anak perempuannya agar bersikap dan berpenampilan sewajarnya saja. Selain itu perempuan juga memang sebagai sumber keindahan meskipun secara fisik, ia sudah sangat tertutup. Perempuan dianggap sebagai manusia yang levelnya dibawah laki – laki. Perempuan dianggap juga lebih bodoh dan polos dibandingkan dengan laki – laki. Perempuan lebih berfikir positif dan berprasangka baik pada lingkungan sekitar, tidak ada pemikiran buruk apapun. Dan biasanya kekerasan/pelecehan seksual bisa terjadi saat emosi dan pelampiasan sesaat, misalnya saat tidak adanya penyaluran hasrat seksual yang tepat. Masih dengan adanya kekuasaan, pelaku kekerasan/pelecehan seksual akan selalu pintar mencari kesempatan dalam kesempatan.

2.5 Konsep Kekerasan Seksual Pada Perempuan

Menurut Suyanto, Bagong (2010) mengangkat di dalam buku Heise (1994) yang dimaksud tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya adalah “segala tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang diarahkan pada seorang perempuan, menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan, atau perampasan kebebasan dan yang melanggar sub-ordinasi perempuan”. Kekerasan/pelecehan seksual pada

dasarnya merupakan kenyataan yang adadalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan sering terjadi dimana – mana. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi disegala bidang. (Sumera Marcheyla,2013 hal:45)

Ada tiga penjelasan besar mengenai terjadinya tindak kekerasan/pelecehan seksual, yakni :

1. Penjelasan yang mengarah ke kondisi internal, karakteristik pribadi pelaku kekerasan atau pelecehan seksual yang menyebabkan kekerasan seksual tersebut terjadi.
2. Penjelasan yang mengarah ke alasan – alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban. Disini, kekerasan/pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkan mudah mengalami kekerasan/pelecehan seksual.
3. Penjelasan feministik, dimana kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan menomor satukan kepentingan dan perspektif laki – laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki – laki.

Menurut Narwoko, D. J & Suyanto, Bagong,(2011:243-244), kekerasan adalah suatu serangan baik terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia bisa terjadi karena berbagai macam

sumber, salah satunya adalah kekerasan yang bersumber pada anggapan gender. Kekerasan semacam itu disebut *gender-related violence*, yang pada dasarnya terjadi karena adanya ketidak setaraan kekuatan atau kekuasaan dalam masyarakat. Macam – macam kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, antara lain : Perkosaan terhadap perempuan, Tindakan pemukulan dan serangan fisik, Penyiksaan organ alat kelamin, Prostitusi atau pelacuran, Kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk pornografi, Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi, Kekerasan terselubung, Kekerasan terhadap perempuan berupa pelecehan.

2.6 Konsep Perlindungan

Perlindungan yang dibahas kali ini merujuk ke dalam perlindungan hukum. Undang – undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak – hak asasi manusia (HAM) khususnya Pasal 45 menyebutkan bahwa “Hak Asasi Perempuan adalah hak asasi manusia”. Dengan demikian karena hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, maka hak asasi perempuan ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Sebagai negara yang beradab, Indonesia telah meratifikasi “Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan” dengan Undang – undang No 7 tahun 1984, dan membuat sebuah undang – undang yang diharapkan dapat menghapus semua tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan didalam lingkup rumah tangga yaitu UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), karena dirasakan bahwa apa yang diatur dalam KUHP

belumkah mencukupi untuk mengeliminir bahkan menghapuskan tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.

Dengan adanya perlindungan/aturan – aturan dan sanksi, bahwa dapat dimengerti hak – hak perempuan tersebut sudah dilindungi. Sudah jelas peraturan tersebut harus dipatuhi, maka dari itu seharusnya laki – laki juga tidak berani melakukan hal – hal yang senonoh lagi. Peraturan itu dibuat supaya laki – laki yang berbuat kejahatan itu jera dan berpikir panjang untuk melakukan tindakan kekerasan. pelecehan seksual terhadap perempuan. Menurut Narwoko, D. J & Suyanto, Bagong, (2011:347) pada umumnya orang berprasangka bahwa feminisme adalah gerakan pemberontakan terhadap kaum laki – laki, upaya melawan pranata sosial yang ada. Asumsi dasar feminisme liberal adalah bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Dalam memperjuangkan masyarakat, menurut kerangka kerja feminis liberal, tertuju pada “kesempatan yang sama dan hak yang sama” bagi setiap individu, termasuk didalamnya kaum perempuan.

2.7 Pentingnya Perlindungan Pada Perempuan

Di Indonesia jaminan hak asasi manusia secara umum bisa ditemui didalam Undang – undang Dasar 1945 amandemen kedua pasal 28 A-J dan Undang – undang No 39 tahun 1999 tentang HAM. Lebih khusus lagi jaminan atas hak asasi perempuan dapat ditemui dalam UU No 7 tahun 1984 tersebut dinyatakan bahwa negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap

perempuan, termasuk adanya kekerasan terhadap perempuan, baik yang meliputi kekerasan di wilayah publik maupun di wilayah domestik. Perlindungan perempuan ada karena merupakan segala upaya yang digunakan sebagai wadah melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak – haknya perempuan itu sendiri, dengan cara memberikan perhatian yang konsisten dan juga sistematis guna mencapai kesetaraan gender.

Semua usaha perlindungan – perlindungan tersebut dilakukan supaya pihak perempuan juga mendapatkan akses partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam pelaksanaan pembangunan serta dalam menikmati hasil – hasilnya serta keamanan. Perempuan akan merasa semakin aman dan juga bebas beraktivitas dimanapun dan kapanpun. Perempuan juga membutuhkan kebebasan bahkan sekarang sering kali perempuan juga tak kalah hebatnya dengan laki – laki. Sudah seharusnya perempuan Indonesia diperlakukan dengan layak.

Rancangan Undang – undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Penghapusan Seksual), yang bertujuan untuk (Komnas Perempuan, 2017:131):

1. Mencapai masyarakat yang bebas kekerasan seksual, dari ranah domestik sampai publik.
2. Memastikan masyarakat yang bebas kekerasan seksual, baik dalam wilayah aman maupun konflik.

Menurut Narwoko, D. J & Suyanto, Bagong,(2011:355-356) menjelaskan bahwa ada tiga asumsi pendekatan kesejahteraan. *Pertama*,

perempuan dianggap lebih sebagai penerima pasif daripada sebagai subjek pembangunan. *Kedua*, peran pengasuhan merupakan peran yang paling penting bagi perempuan dalam masyarakat. *Ketiga*, mengasuh adalah peran perempuan yang paling efektif dalam semua aspek pembangunan ekonomi. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan praktis gender yang berkaitan dengan peran reproduksi perempuan. Selanjutnya ada pendekatan keadilan, yang mana pendekatan ini berusaha mengurangi ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam pembagian kerja secara seksual, maka pendekatan keadilan ini juga memenuhi kebutuhan strategis gender.

